

PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY TENTANG ISLAM POLITIK
(Telaah Kritis Mengenai Problem Akomodasi Islam dan Relasinya
dengan Negara di Era Orde Baru)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam

Oleh :

Thomas Herlendra
Nim. 00510201

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Alim Roswantoro, M. Ag
Fachruddin Faiz, M. Ag.
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Thomas Herlendra
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Thomas Herlendra
NIM : 00510201
Jurusan : Aqidah Filsafat
Fakultas : Ushuluddin
Judul Skripsi : **Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Islam Politik**
(Telaah Kritis Mengenai Problem Akomodasi Islam dan Relasinya dengan Negara di Era Orde Baru).

Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dipertanggungjawabkan.

Demikian, nota dinas ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

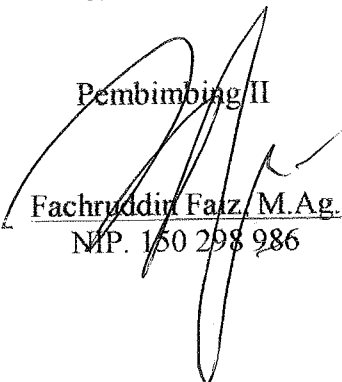
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2007

Pembimbing I


Alim Roswantoro, M.Ag.
NIP. 150 289 262

Pembimbing II


Fachruddin Faiz, M.Ag.
NIP. 150 298 986



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

iii

Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281. Telp/fax. (0274) 512156

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1501/2007

Skripsi dengan judul: **Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Islam Politik**
(Telaah Kritis Mengenai Problem Akomodasi Islam dan
Relasinya dengan Negara di Era Orde Baru).

Diajukan oleh:

1. Nama : Thomas Herlendra
2. NIM : 00510201
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Aqidah Filsafat

Telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, tanggal 21 Juni 2007, dengan nilai: 87,33
(A-) dan telah dinyatakan Syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

Sekretaris Sidang

Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150289206

Pembimbing/merangkap Penguji

Alim Roswanto, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150289262

Pembantu Pembimbing

Fahrudin Faiz, M.Ag
NIP. 150298986

Penguji I

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
NIP. 150235497

Penguji II

Zuhri, S.Ag, M.Ag
NIP. 150318017

Yogyakarta, 21 Juni 2007

DEKAN

Drs. H. M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150088748

Motto

**Bagi orang yang mempunyai mata,
Maka fajar telah terbit**

(Sayidina Ali)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini aku persembahkan kepada:

Nenekku, Selamat Jalan

Allah Yarham

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena karunia-Nya kita senantiasa masih dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam yang selalu terlimpah pada Rosulullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita akan makna hidup yang sesungguhnya.

Kini, perjalanan panjang itu akhirnya sampai juga mengantarkan penulis ke penghujung studi. Semua ini tentunya sebuah proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, dengan penuh kerendahan hati dan setulus-tulusnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

- Bapak Drs. H. Fahmi Muqaddas, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ketua Jurusan Aqidah Filsafat, bapak Drs. Sudin, M. Hum.
- Bapak Alim Roswanto, M.Ag dan Bapak Fahrudin Faiz, M.Ag yang bersedia bertindak sebagai pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini dengan segala arahan, petunjuk maupun saran yang diberikan demi pencapaian hasil yang sebaik-baiknya.
- Ibu dan Bapak yang selalu memberikan pengorbanan dan do'a, serta adik-adikku tercinta.
- Istriku terhebat dan anakku Avatar atas pengabdian dan pengorbanannya yang tak kenal lelah.
- Ade, Daldiri, dan seluruh para *Muhibbin* dimana pun kalian berada.

- Agus Raja, Ucok, Amer, Muajib, Ali dan seluruh teman-teman AF angkatan 2000
- Puncaknya, kepada Al-Imam Asy-Syarif Al-Habib Muhammad Effendi Al-Aydrus atas bimbingan spiritualnya yang tak ternilai dengan apapun.

Yogyakarta, 15 Juni 2007

Penyusun,

Thomas Herlendra

NIM. 00510201



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Politik akomodasi negara atas Islam dianggap sebagai rekonsiliasi baru dalam hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru, setelah lama Islam politik mengalami konflik dan peminggiran oleh negara dalam setiap aspek sosial-politik. Praktek akomodasi negara atas Islam dianggap sebagai wujud konkret dari membaiknya hubungan tersebut. Negara mulai mengakomodasi beragam kepentingan-kepentingan umat Islam, seperti disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan (1988), disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) yang memperkuat posisi pengadilan agama (1989), Pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), kompilasi hukum Islam (1991), keputusan bersama menteri mengenai Bazis (1991), dihapusnya larangan pemakaian Jilbab (1991), Festival Istiqlal (1991), dibentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dan penghapusan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) pada tahun 1993.

Bahtiar Effendy dalam teori-teorinya mengenai politik akomodasi, menyambut praktek akomodatif negara tersebut secara keseluruhan positif, dan melihat hal ini sebagai perkembangan baru ke arah integrasi dan kembali harmonisnya hubungan Islam dan negara. Walaupun demikian, integrasi dan harmonisasi hubungan Islam dan negara dalam konteks politik akomodasi dipahami secara lain oleh para pengkritiknya. Hal ini dikarenakan banyaknya analisis yang menganggap persoalan tersebut bukanlah integrasi nasional dimana pluralisme dan demokrasi telah ditegakkan oleh kalangan Islam, melainkan hanya integrasi Islam semata dimana negara terlibat memainkan sentimen sektarian didalamnya demi menegakkan *status quo* kekuasaan.

Atas dasar itulah, penulis mencoba merumuskan dua persoalan yang dianggap mampu menjawab persoalan akomodasi Islam oleh negara tersebut. *Pertama*, bagaimanakah akomodasi Islam politik di era Orde Baru dalam pemikiran Bahtiar Effendy ? *Kedua*, Bagaimanakah memahami problema akomodasi Islam politik dalam relasinya dengan negara dalam pemikiran Bahtiar Effendy ?

Kedua rumusan masalah di atas, mengharuskan penulis untuk menggunakan metode yang tepat, sebagaimana tipe penelitian yang bersifat literatur dan rumusan masalah yang sudah dicanangkan, penulis menggunakan metode interpretasi dan deskripsi, disamping juga menggunakan pendekatan filsafat politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, politik akomodasi dalam pemikiran Bahtiar Effendy lebih sebagai perwujudan integrasi dan harmonisasi dalam hubungan Islam dan negara. Integrasi dan harmonisasi dalam hubungan Islam politik dan negara ini terjadi tidak didasarkan atas kehendak politik dari pribadi Soeharto semata, tetapi lebih pada perubahan corak sosiologis dari umat Islam yang telah menjadi bagian dari kelas menengah sehingga tak dapat diabaikan oleh negara. Selain itu, yang paling menentukan adalah dampak dari gerakan substansialisme Islam politik yang telah meninggalkan pola lamanya yang formalistik.

Kedua, dari analisis atas teoritisasi Bahtiar atas politik akomodasi, ternyata hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berseberangan dengan pemikiran Bahtiar sendiri. Akomodasi Islam politik yang dianggap Bahtiar sebagai integrasi Islam dan negara ternyata mengandung bias sektarian dan eksklusif, walaupun Bahtiar menentang klaim tersebut. Sedangkan kelas menengah Islam sendiri yang digadang sebagai penyebab terjadinya akomodasi memang lebih berwatak akomodasionis dari pada oposisi untuk memperjuangkan demokrasi. Sedangkan substansialisme Islam politik tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai penyebab utama terjadinya politik akomodasi. Karena apa yang paling pokok dari prinsip-prinsip substansialisme Islam politik seperti keadilan, egalitarianisme, dan musyawarah yang harus disubstansialisasikan dalam bentuk demokratisasi dan pluralisme tidak terjadi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode dan Pendekatan Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BIOGRAFI INTELEKTUAL BAHTIAR EFFENDY	
A. Latar Belakang Hidup dan Pendidikan	20
B. Karya-karyanya	21
C. Pola Pemikiran Bahtiar dalam Pemikiran Politik Islam Indonesia	24

**BAB III PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY MENGENAI AKOMODASI
ISLAM POLITIK OLEH NEGARA DI ERA ORDE BARU**

- A. Politik Akomodasi sebagai Relasi Baru Islam Politik
dan Negara 32
- B. Kritik atas Paradigma Tipe Kepribadian Politik Soeharto,
menimbang Corak Sosial-Politik Islam di Indonesia..... 44
- C. Substansialisme Islam Politik Sebagai *Vera Causa*..... 53

**BAB IV PROBLEM AKOMODASI ISLAM POLITIK DAN RELASINYA
DENGAN NEGARA**

- A. Problem Integrasi dalam Akomodasi Islam Oleh Negara... 73
- B. Problem Kelas Menengah Islam yang Akomodasionis 92
- C. Problem Substansialisme Islam Politik dalam Politik
Akomodasi 102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 116
- B. Saran-Saran 117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam politik secara umum dapat dimaknai sebagai pola pemikiran Islam ketika berhadapan pada wilayah politik. Dalam sejarahnya, Islam politik kadang disebut juga dengan Islam ideologis atau juga Islam dogmatis. Ciri utamanya dalam hal ini nampak dalam kecenderungan utamanya untuk mendesak wacana dan gerakan formalisasi syariat Islam, institusionalisasi Islam, penegakan syariat Islam, dan pembentukan pemerintahan Islam. Namun, tidak selamanya Islam politik harus dimaknai dalam pola pemikiran yang demikian. Karena, di masa sekarang misalnya, Islam politik cenderung mengekspresikan dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.¹

Dalam sejarah hubungan Islam politik dan negara, rezim-rezim kekuasaan seringkali mengalami konflik dan kekerasan dengan kalangan Islam. Pada masa Soekarno, rezim kekuasaan seringkali bersikap antagonistik terhadap Islam politik yang terlalu obsesif menegakkan tatanan kehidupan berdasarkan syariat Islam, hukum Islam, dan upaya-upaya mendirikan negara Islam. Bahkan, upaya-upaya politik tersebut seringkali berujung pada

¹ M. Arief Hakim, *Jejak-jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*, (Jakarta: Ditperta, 2004), hlm. 334-335.

pemberontakan radikal bersenjata, pemisahan diri dari NKRI dan upaya pendirian negara Islam.²

Peminggiran Islam politik terus berlanjut pada masa Orde Baru. Menurut Rusli Karim, ada dua hal pokok yang menyebabkan kelemahan Islam politik pada masa ini. Pertama, persepsi Islam politik yang masih bersifat ideologis. Mayoritas umat Islam masih menggunakan garis panduan politik lamanya yang lebih bersifat "simbolik-ideologis Islam", dimana partai politik Islam dianggap sebagai satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Hal ini terlihat dengan kuatnya keinginan untuk merehabilitasi partai Masyumi yang pada akhirnya digagalkan oleh negara pada saat itu. Kedua, kelemahan internal umat Islam sendiri. Yaitu lemahnya potensi kalangan Islam politik untuk bersaing dengan kelompok dari kalangan nasionalis dan Kristen, sempitnya wawasan pikiran para pemimpin organisasi Islam, persaingan pengaruh dan tiadanya visi yang tunggal di antara partai-partai Islam dan organisasi-organisasi masyarakat Islam.³

Kedua faktor ini membuat Orde Baru mengabaikan kepentingan Islam politik. Islam politik yang ideologis sangat bertentangan dengan wawasan politik Orde Baru. Orde Baru mewarisi kondisi ekonomi yang buruk dan kekacauan politik yang besar dari Orde Lama. Untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut, penetrasi modal asing dan terintegrasinya

² Yudi Latief, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 401-422.

³ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 239-240.

Indonesia ke dalam kapitalisme dunia merupakan tuntutan struktural yang tak dapat dihindarkan. Demi pembangunan ekonomi yang kuat, Orde Baru menekankan prinsip pokok bahwa pembangunan ekonomi lebih utama daripada demokrasi politik, berakhirnya kepentingan ideologis dari apa yang ada di masa lalu, dan politik stabilitas untuk mengendalikan mobilitas sosial yang membahayakan pembangunan.⁴

Dalam konteks pembangunan ekonomi sebagai prioritas ini, upaya modernisasi dilakukan secara terencana baik pada tingkat teknis, ideologis dan strategis. Oleh karenanya, segala pemikiran keagamaan (termasuk Islam politik) hanya akan relevan dan berarti kalau berada dalam kesesuaian dengan kepentingan ekonomi-politik Orde Baru. Agama dan kebudayaan akan dikembangkan selama tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan tidak mengganggu stabilitas politik negara. Pada titik ini, agama dan kebudayaan hanya diperlakukan untuk kepentingan teknis belaka.⁵

Proses peminggiran Islam politik ditandai diantaranya dengan makin terkucilnya partai-partai Islam. Dalam wilayah legislatif, hasil rata-rata dalam empat kali pemilihan umum di era 1970-an dan 1980-an menunjukkan bahwa partai Islam berada di bawah batas 25 persen suara. Begitu juga pada tingkat eksekutif, sejak 1973 partai Islam disingkirkan dari Kabinet. Proses peminggiran Islam politik mencapai puncaknya ketika diberlakukan undang-

⁴ Saiful Muzani, "Berteologi Sebagai Praktek Politik: Suatu Kesaksian Islam Orde Baru", dalam Th. Sumartana (ed.), *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1994), hlm. 182-183

⁵ *Ibid.*, hlm. 186.

undang "Ormas dan Orpol" pada tahun 1985. Pemberlakuan undang-undang ini mensyaratkan dilepaskannya asas Islam dalam partai politik dan segala kaitan simboliknya. Dengan demikian, Orde Baru benar-benar telah melakukan depolitisasi atas Islam politik.⁶

Dalam kondisi Islam politik yang terpinggirkan oleh negara tersebut, lahirlah beragam respons pemikiran dan aksi Islam yang berusaha menyikapi hubungan Islam dan negara. *Pertama*, adalah respons dari kalangan pembaharu yang berpandangan sangat akomodatif dalam hal hubungan Islam dan tantangan modernisasi Orde Baru yang secara tidak langsung berkembang pada cara pandang Islam dan negara. Di antara tokoh yang terkenal dari kalangan ini adalah Nurkholish Madjid dengan jargonnya yang terkenal "Islam yes, partai Islam no". Lewat jargon ini, Nurkholish berusaha menghapuskan mitos Islam politik sebagai pembangkang atau oposan terhadap negara dengan menolak watak simbolis dan ideologis dari Islam politik. Pernyataan politik itu hendak menarik umat yang selama ini bersikap oposan pada pemerintah agar masuk terlibat untuk ikut serta dalam pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.⁷

Kedua, adalah respons dari Gerakan yang dipengaruhi semangat revivalisme Islam yang banyak dimotori oleh kalangan "veteran" Masyumi. Ketika secara struktural mereka gagal merehabilitasi partai Masyumi, mereka berupaya melestarikan semangat dan cita-cita Masyumi lewat gerakan

⁶ Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran...* hlm. 242.

⁷ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 71-73.

dakwah. Lewat lembaganya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), kalangan revivalis berusaha memperjuangkan Islam dengan membentuk kader-kader dakwah yang bersemangatkan revivalisme Islam. Suatu cara pandang yang menghendaki Islam sebagai jalan hidup yang menyeluruh. Islam bukan hanya nilai, tapi sekaligus hukum. Bukan hanya isi, tetapi juga bentuk. Media dakwah adalah salah satu media yang mengkomunikasikan keislaman kelompok revivalis ini.⁸

Menurut Hefner, kalangan revivalis ini kurang akomodatif terhadap rezim Soeharto ketimbang rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok pembaharu. Walaupun kalangan ini tidak lagi kental dengan semangat Islam politik yang ideologis lewat jalur partai Islam yang mengalami depolitisasi, DDII tetap melancarkan kritik tajam dan tidak kompromi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal perjudian, kesucilaan seksual, dan yang paling ditekankan "ancaman" Kristianitas. Para pemimpin DDII juga bersikap keras anti-Barat dalam hal politik luar negeri.⁹

Terakhir, adalah respons dari kalangan yang lebih menekankan transformasi sosial. Diantara tokohnya yang terkenal adalah Dawam Raharjo, Adi Sasono dan Tawang Alun. Kelompok ini memandang bahwa kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam dan rakyat Indonesia secara keseluruhan tidak bisa ditanggulangi dengan hanya bersandarkan pada elite politik dan

⁸ Saiful Muzani, "Berteologi Sebagai Praktek Politik...hlm. 194-195.

⁹ Robert Hefner, "Agama: Berkembangnya Pluralisme", dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia, 2001) hlm. 401-402.

ekonomi negara. Kaum transformis berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah, dan memperkuat posisi tawar-menawar rakyat, terutama kelas bawah ketika berhadapan dengan kepentingan penguasa.¹⁰

Perubahan respons-respons tersebut dianggap membuahkan hasil ketika pada menjelang akhir tahun 1980-an dan sepanjang tahun 1990-an hingga menjelang tumbanganya rezim Soeharto berlangsungnya akomodasi Islam oleh negara. Sikap akomodatif negara atas Islam dianggap sebagai kembali membaiknya hubungan Islam dan negara yang sangat kontras dengan masa-masa sebelumnya, ketika negara melakukan peminggiran atas Islam politik dengan sikap depolitisasinya. Menurut Rusli Karim, dalam konteks internal umat Islam, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akomodasi Islam. *Pertama*, penerimaan umat Islam secara bulat atas Pancasila pada tahun 1985. Penerimaan ini menyebabkan Islam tidak lagi menjadi ancaman ideologi negara. *Kedua*, keberadaan dua tokoh yang erat hubungannya dengan Soeharto, yaitu Habibie dan Munawir Syadzali. Kedua tokoh ini berhasil meyakinkan Soeharto bahwa Islam tidak lagi menjadi ancaman rezim. *Ketiga*, meningkatnya kesadaran keagamaan di kalangan umat Islam. *Keempat*, munculnya cendekiawan/intelektual muslim. *Kelima*,

¹⁰ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran...* hlm. 102-104

keadaan pribadinya Soeharto yang semakin tua, dan keinginannya untuk mengakhiri masa jabatannya dengan tidak menyakiti kelompok Islam.¹¹

Berlangsungnya praktek akomodasi Islam oleh negara juga direspons secara positif oleh Bahtiar Effendy dalam pemikirannya tentang politik akomodasi. Secara substansial, Bahtiar Effendy tidak berbeda dengan Rusli Karim, yaitu sama-sama memandang praktek akomodatif sebagai suatu akhir dari berakhirnya masa-masa penindasan negara atas Islam politik. Bagi Bahtiar, akomodasi Islam adalah suatu hubungan baru yang lebih integratif antara Islam politik dan negara Orde Baru. Bukti dari integrasi dan harmoni antara Islam dan negara ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan konkret negara yang menguntungkan kepentingan umat Islam. Langkah-langkah konkret akomodasi tersebut, terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta (1988), disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) yang memperkuat posisi pengadilan agama (1989), dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memperlebar jalan masuk struktural kalangan Islam untuk mempengaruhi kebijakan, disahkannya Kompilasi Hukum Islam (1991), dikeluarkannya keputusan bersama tingkat Menteri mengenai Badan Amil Zakat dan Shadaqah atau Bazis (1991), dihapuskannya kebijakan lama yang melarang siswi-siswi muslim

¹¹ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 230-233.

mengenakan Jilbab pada Jam Sekolah (1991), pelaksanaan festival kebudayaan Islam Istiqlal (1991 dan 1995), dibentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, dan penghapusan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB (1993).¹²

Walaupun demikian, Bahtiar berbeda dengan Karim dalam memandang terjadinya politik akomodasi oleh negara. Bahtiar lebih cenderung melihat langkah-langkah akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan dua paradigma yang mewarnai perkembangan sosiologis dan politis masyarakat Islam Indonesia sejak dasawarsa 1970-an. Pertama, bagi Bahtiar, selama dua puluh lima tahun terakhir, komunitas Islam telah mengalami proses mobilisasi sosial-ekonomi dan politik yang berarti. Hal ini adalah dampak dari pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan meluasnya akses ke pendidikan modern bagi banyak umat Islam. Proses mobilisasi sosial-ekonomi dan politik ini telah mentransformasikan umat Islam menjadi bagian dari kelas menengah, dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karenanya, bagi Bahtiar, terjadinya akomodasi Islam oleh negara adalah suatu hal yang wajar, karena sebagai bagian dari kelas menengah yang besar, kepentingan umat Islam tidak dapat diabaikan begitu saja oleh negara.¹³

Kedua, faktor penentu bagi negara untuk mengambil langkah-langkah akomodatif adalah adanya gerakan yang transformatif baik dalam pemikiran

¹² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 334-335.

¹³ *Ibid.*, hlm. 317.

dan perilaku politik yang dipelopori oleh generasi baru Islam atau kelompok yang disebut pembaharu. Generasi baru inilah yang telah melakukan proses transformasi intelektualisme dan aktivisme Islam politik yang dulunya bersifat legalistik-formalistik (Islam ideologis) menjadi lebih substansialistik. Suatu corak baru gerakan Islam politik yang lebih menekankan substansi dari pada bentuk, yang pada akhirnya mensintesakan suatu format pemikiran dan tingkah laku politik yang tidak berlawanan dengan konstruk negara-bangsa Indonesia dan Pancasila seperti sebelumnya. Format baru ini telah menghilangkan persepsi negatif atas Islam politik sebagai ancaman bagi negara, dan melapangkan jalan terjadinya akomodasi Islam.¹⁴

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana dalam paparan di atas, maka untuk memberikan kejelasan arah pembahasan penulisan skripsi serta memberikan batasan pembahasan agar supaya persoalan tidak melebar, sangatlah penting adanya rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan. Secara rinci permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akomodasi negara terhadap Islam politik di era Orde Baru dalam pemikiran Bahtiar Effendy ?
2. Bagaimanakah problem akomodasi negara terhadap Islam politik dalam pemikiran Bahtiar Effendy ?

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 318-319.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan pemetaan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memaparkan hubungan politik akomodasi negara atas Islam, terutama atas apa yang dianggap Bahtiar bagian dari berubahnya pemahaman teologi-politik Islam dari formalisme menuju substansialisme, yang menurutnya sebagai langkah terjadinya rekonsiliasi antara Islam dan negara.
2. Memaparkan sebuah proses analisis atas kaitan wacana akomodasi Islam politik dan relasinya dengan negara dalam pemikiran Bahtiar Effendy. Hal ini bertujuan dan berguna setidaknya untuk memetakan ulang problem integrasi Islam dan negara.

Disamping itu, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran politik Islam. Lebih dari itu, semoga penelitian ini memiliki nilai guna bagi upaya pengembangan wacana pemikiran politik Islam di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Studi-studi mengenai pemikiran Bahtiar Effendy memang cukup banyak, tapi tidak banyak yang membicarakan pemikirannya tentang akomodasi secara lebih sistematis. Berikut beberapa riset pustaka yang penulis temukan untuk melihat kelayakan penelitian ini.

Dalam bentuk penelitian skripsi, penulis tidak menemukan kajian mengenai tema yang penulis bahas. Namun, ada dua kajian yang

memfokuskan kajian mengenai pemikiran Bahtiar Effendy. *Pertama*, Afif Mu'zi, "Demokrasi dalam Islam: Studi Perbandingan Pemikiran Nurkholis Madjid dan Bahtiar Effendy", *skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002. Dan *Kedua*, Arif Kurniawan, "Studi Pemikiran Bahtiar Effendy tentang Demokrasi", *skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2005. Namun sayangnya, kedua penelitian ini tak dapat penulis teliti, karena termasuk skripsi yang mengalami rusak parah akibat gempa bumi sehingga diisolasi oleh pihak perpustakaan.

Dalam satu sub-bab "Retrospeksi dan Reinterpretasi atas Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam" dalam buku M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta, 1995). Anwar membedakan antara "akomodasionis" dan "akomodatif". Menurutnya, akomodasionis lebih menunjukkan sikap yang dihayati dan menjadi pendirian seseorang, untuk selalu melakukan kolaborasi atau kolusi dengan pihak lain atau kelompok lain untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Sedangkan akomodatif lebih berhubungan dengan metode, pendekatan atau strategi yang dipakai seseorang dalam upayanya mencari kesesuaian atau konvergensi dengan pemikiran pihak lain, demi tercapai tujuan jangka panjang yang dicita-citakan. Anwar sejalan dengan Bahtiar dalam melihat sikap akomodatif sebagai dampak gerakan intelektual yang berusaha merumuskan secara baru doktrin Islam untuk merespons perubahan sosial-politik yang cepat dalam rezim Orde Baru. Bagi Anwar, sikap akomodatif sebagai implikasi yang tak terelakkan agar umat

Islam tidak dalam posisi resisten dan beroposisi, karena menolak akomodasi negara hanya memperburuk kondisi umat Islam secara keseluruhan.

Pandangan Anwar tentang akomodasi mempunyai beberapa masalah. Pertama, Anwar melakukan generalisasi bahwa sikap akomodatif seolah-olah demi kepentingan politik umat Islam secara keseluruhan. Dalam hal ini, Anwar tidak mengulas lebih jauh pandangan umat Islam yang lebih memilih beroposisi walaupun corak politik Islam yang substansialistik melekat juga didalamnya. Kedua, Anwar memiliki persamaan dengan Bahtiar dalam melihat akomodasi sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Tapi tidak menjelaskan secara langsung argumen-argumen penting Bahtiar yang lain tentang corak sosiologis dan apa yang disebutnya imperatif politik negara dalam konteks akomodasi.

Sementara itu, M. Rusli Karim dalam bukunya *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, (Yogyakarta, 1999) menganggap akomodasi Islam oleh negara sebagai masa berakhirnya penindasan atas Islam Politik setelah sekian lama terpinggirkan. Rusli Karim hanya melihat aspek positif tentang akomodasi lewat Bahtiar. Terutama klasifikasi dari empat corak akomodasi Bahtiar. Yaitu akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi infrastruktural dan akomodasi budaya.

Kritik atas pemikiran Bahtiar Effendy datang dari Ahmad Baso dalam bukunya *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran*

"*Civil Society*" dalam *Islam Indonesia*, (Bandung, 1999). Dalam suatu tema mengenai teks dan wacana dalam bukunya, Studi Baso mengkritik epistemologi kajian Bahtiar tentang Islam dan Negara. Terutama mempersoalkan pandangan Bahtiar tentang Islam sebagai agama yang poliinterpretasi (*Polyinterpretable*) yang kemudian memilah antara pandangan legal-formal (politik eksklusif) dan substansialis (politik inklusif), lalu mengukuhkan pandangan substansialis sebagai idealisme dan aktivisme Islam baru. Pengukuhan ini dalam pandangan Baso berwatak totalistik. Kajian Baso menolak pada upaya membangun penafsiran keislaman dengan memilih salah satunya dalam melihat wacana Islam dan *Civil Society*.

Selain itu, kajian langsung yang mengkritik pandangan Bahtiar tentang akomodasi dilakukan oleh Rumadi, dalam bukunya *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia* (Bekasi, 2002). Dalam artikel singkatnya yang berjudul *Mitos Akomodasi Islam* Rumadi sampai pada kesimpulan bahwa akomodasi Islam dalam pemikiran Bahtiar tidak lebih sebagai mitos politik yang diciptakan untuk menundukkan masyarakat dihadapan negara, dan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok modernis belaka. Namun, beberapa asumsinya masih butuh kajian mendalam karena campur aduk dengan prasangka yang tidak memusat pada fokus argumentasi Bahtiar secara mendalam. Misalnya, kepentingan akomodasi sebagai tujuan antara untuk mendirikan negara Islam, dan akomodasi tidak lebih sebagai revivalisme Islam Politik yang berujung pada pembentukan negara agama. Dalam kedua permisalan ini, Rumadi cenderung a-historis

memahami pandangan Bahtiar. Hal ini menjadi wajar karena Rumadi hanya menulisnya dalam tiga lembar artikel saja.

E. Metode dan Pendekatan Penelitian

Maksud dari metode adalah supaya kegiatan penelitian terlaksana secara rasional dan terarah, agar dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk sebuah karya ilmiah, metode mempunyai peranan yang sangat penting. Metode yang digunakan dalam sebuah penelitian menentukan hasil penelitian tersebut. Sebuah metode penelitian merupakan ketentuan standar yang harus dipenuhi.

Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Penekanan pada metode ini difokuskan pada hasil-hasil pemikiran sang tokoh, yang diambil dari buku-buku utamanya, dan juga buku-buku yang relevan dengan persoalan ini. Adapun dalam tehnik pengumpulan datanya dibagi menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Data yang berhubungan langsung dengan karya-karya Bahtiar Effendy, yaitu dalam karya pentingnya *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (1998)*. Karena, karya inilah yang paling komprehensif membicarakan politik akomodasi.

b. Data Sekunder

Untuk data-data sekunder adalah tulisan-tulisan dari para penulis lain yang membahas pemikiran Bahtiar Effendy dan hasil-hasil

penelitian yang pada umumnya mengulas wacana politik Islam pada masa Orde Baru.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode deskripsi adalah cara untuk mendapatkan informasi, keterangan, proposisi-proposisi, konsepsi-konsepsi, dan hakekat yang sifatnya mendasar, atau memberikan uraian secara teratur dan runtut dalam menganalisa seluruh konsep pemikiran yang akan kita teliti.

b. Interpretasi

Metode ini digunakan untuk membongkar makna terhadap bermacam-macam fakta.¹⁵ Fakta-fakta dari pemikiran tokoh tersebut diselami sebaik mungkin untuk menangkap arti dan nuansa uraian yang kita teliti. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusiawi dari sang tokoh.

c. Kesenambungan Historis

Metode ini digunakan untuk mengungkap lingkup historisitas dari pemikiran sang tokoh dalam perjalanan hidupnya, mengenal perkembangan pemikirannya, dan relasi-relasi intelektual yang membangun pola pemikirannya.

¹⁵Anton Bekker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 94

Disamping beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan pula pendekatan filsafat politik. Pendekatan filsafat politik dalam konteks skripsi ini lebih diarahkan penekanannya pada trend filosofis (*philosophical trend*) yang spekulatif idealistik dan nilai etis dalam persoalan-persoalan politik.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proses kemudahan untuk memahami dan mendapatkan suatu hasil yang utuh (*integrated*), serta mampu memberikan penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis dan teratur. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang terbagi menjadi beberapa sub bab untuk membedakan pembahasan.

Bab I, pendahuluan, sebagai pengantar dalam pembahasan skripsi secara keseluruhan. Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pendekatan dan sistematika pembahasan

Bab II, memaparkan Biografi intelektual Bahtiar Effendy yang meliputi latar belakang kehidupan dan pendidikannya, karya-karyanya, dan pola pemikirannya dalam bingkai pemikiran politik Islam Indonesia.

Bab III, memaparkan pandangan Bahtiar Effendy tentang akomodasi Islam politik di era Orde Baru. Dalam pembahasan ini penulis menguraikan tentang politik akomodasi sebagai relasi baru Islam dan negara, kritik atas

¹⁶ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), hlm. 16-20. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 18-19.

paradigma tipe kepribadian politik Soeharto, menimbang corak sosial- politik Islam di Indonesia, dan substansialisme Islam politik sebagai *Vera causa*.

Bab IV, analisis tentang problem hubungan akomodasi Islam politik dan relasinya dengan Negara dalam Pemikiran Bahtiar Effendy. Dalam pembahasan ini akan diuraikan penafsiran atas akomodasi Islam politik dan relasinya dengan negara dalam pemikiran Bahtiar. Pembahasan ini mencakup tentang: Problem integrasi dalam akomodasi Islam oleh negara, problem kelas menengah Islam yang akomodasionis, problem substansialisme Islam politik dan politik akomodasi.

Bab V, merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengakhiri penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa poin yang dianggap penting. Paling tidak ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan:

Pertama, politik akomodasi dalam pemikiran Bahtiar Effendy lebih sebagai perwujudan integrasi dan harmonisasi dalam hubungan Islam dan negara. Integrasi dan harmonisasi dalam hubungan Islam politik dan negara ini terjadi tidak didasarkan atas kehendak politik dari pribadi Soeharto semata, tetapi lebih pada perubahan corak sosiologis dari umat Islam yang telah menjadi bagian dari kelas menengah sehingga tak dapat diabaikan oleh negara. Selain itu, yang paling menentukan adalah dampak dari gerakan substansialisme Islam politik yang telah meninggalkan pola lamanya yang formalistik. Substansialisme telah berusaha melakukan proses transformasi intelektual yang membangun upaya memungkinkan untuk membangun Islam politik yang tidak akan berbenturan dengan konstruk kesatuan nasional negara-bangsa Indonesia. Oleh karenanya, substansialisme Islam politik telah menegasikan mitos Islam politik yang selalu menjadi ancaman negara dalam sejarahnya.

Kedua, dari analisis atas teoritisasi Bahtiar atas politik akomodasi, ternyata hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berseberangan dengan pemikiran Bahtiar sendiri. Akomodasi Islam politik yang dianggap

Bahtiar sebagai integrasi Islam dan negara ternyata mengandung bias sektarian dan eksklusif, walaupun Bahtiar menentang klaim tersebut. Sedangkan kelas menengah Islam sendiri yang digadang sebagai penyebab terjadinya akomodasi memang lebih berwatak akomodasionis dari pada oposisi untuk memperjuangkan demokrasi. Sedangkan substansialisme Islam politik tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai penyebab utama terjadinya politik akomodasi. Karena apa yang paling pokok dari prinsip-prinsip substansialisme Islam politik seperti keadilan, egalitarianisme, dan musyawarah yang harus disubstansialisasikan dalam bentuk demokratisasi dan pluralisme tidak terjadi.

B. Saran-Saran

Hampir dapat dipastikan, bahwa penelitian ini hanya bertumpu pada aspek persoalan politik akomodasi Islam dalam pemikiran Bahtiar Effendy dengan pendekatan filsafat politik. Dengan demikian, penelitian ini lebih banyak berorientasi pada wilayah teoritik. Sedangkan implikasi sosial-politik yang lebih jauh dari politik akomodasi hingga masa sekarang belum menjadi garapan penelitian ini. Karenanya, menjadi tugas penting bagi peneliti yang akan melanjutkan kajian ini untuk melakukan telaah secara historis-praktis dan melakukan upaya yang lebih empirik dalam melihat persoalan ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Fachry, dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986)
- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Ali-Fauzi, Nasrullah (ed.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Anwar, Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Assyaukanie, Luthfi (ed.), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, (Jakarta: JIL, 2002)
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi Di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKIS, 2002)
- Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)
- _____, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, (Jakarta: Desantara, 2002)
- _____, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005)
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Billah, M.M, *Kelas Menengah digugat*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993)
- Bruinessen, van, Martin, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999)
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Dharwis, Ellyasa (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKIS, 1997)
- Effendy, Bahtiar, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik ?*, (Bandung: Mizan, 2000)
- _____, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001)

- _____, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001)
- _____, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Gusmian, Islah, "Islam dan Orde Baru: Politik Akomodasi atau Hegemoni ?" dalam Islah Gusmian (ed.), *Soeharto Sehat*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006)
- Harb, Ali, *Hermeneutika Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema (Yogyakarta: LKIS, 2003)
- Harb, Ali, *Kritik Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema (Yogyakarta: LkiS, 2004)
- Hefner, W, Robert, *Civil Islam: Islam Dan Demokratisasi Di Indonesia*, terj. Ahmad Baso (Jakarta: Esai, 2001)
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta, Paramadina, 2005)
- Latief, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Bandung, Mizan, 2005)
- Mulkhan, Munir, Abdul, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1999)
- Raharjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1999)
- Said, W. Edward, *Peran Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith Tahun 1993*, terj. Rin Hindryati P. Dan Hasudungan Sirail, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998)
- Saleh, Fauzan, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, terj. Fauzan Saleh, (Jakarta: Serambi, 2004)
- Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, (Yogyakarta: INSIS Press dan Pustaka Pelajar, 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2001)
- Sumartana, TH (ed.), *Spiritualitas Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994)
- Suryomenggolo, Jafar, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: Politik Asimilasi Orde Baru*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000)
- Tanter, Richard dan Kenneth Young (ed.), *Politik Kelas Menengah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1996)

Jurnal

- Eko, Sutoro, "*Birokrasi, Modernisasi dan Kapitalisme Orde Baru*", Jurnal Prisma No. 8/Agustus/1996
- Raharjo, Dawam, "*Basis Sosial Islam Di Indonesia Sejak Orde Baru*", Jurnal Prisma No.3/xx/Maret/1991
- Sundhaussen, UIF, "*Demokrasi dan Kelas Menengah*", Jurnal Prisma No. 2/Februari/1992
- Wahid, Abdurrahman, "*Intelektual di Tengah Eksklusivisme*", Jurnal Prisma No. 3/Maret/ 1991
- Wahid, Abdurrahman, "*Politik sebagai Moral, bukan Institusi*", Jurnal Prisma No. 5/Mei/1995
- Bruinessen, van, Martin, "*Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial dan Budaya (Sektarian Movements in Indonesian Islam: Sosial and Cultural Background)*", Jurnal Ulumul Qur'an Vol. III No. 1,1992



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA